

## Peran Literasi Kewarganegaraan Digital dalam Menangkal Polarisasi Politik di Ruang Publik Virtual

Ahmad Zulkarnain Effendi<sup>1</sup>, Siti Fatimah Rahayu<sup>2</sup>, Muhammad Ikhsanuddin Pratama<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Komunikasi dan Dakwah, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, STAI Bumi Silampari Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Corresponding Author: [ahmadzulkarnaineffendi@gmail.com](mailto:ahmadzulkarnaineffendi@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [sitifatimahrahayu@gmail.com](mailto:sitifatimahrahayu@gmail.com)<sup>2</sup>

### Info Artikel

**Received: 23 Desember 2025**

**Revised : 10 Januari 2026**

**Accepted: 29 Januari 2026**

**Published: 06 Februari 2026**

### Keywords:

Digital Civic Literacy; Political Polarization; Virtual Public Space; Democratic Resilience

### Kata Kunci:

Literasi Kewarganegaraan Digital; Polarisasi Politik; Ruang Publik Virtual; Ketahanan Demokrasi

### Abstract

*This study investigates the role of digital civic literacy in countering political polarization in virtual public spaces in Indonesia. The background stems from the rapid spread of political misinformation and identity-based division intensified through social media platforms, particularly during electoral periods. The purpose is to analyze how digital civic literacy competencies function as a protective factor against polarizing narratives and to identify effective strategies for its development. Employing a qualitative approach through critical discourse analysis and library research, this study examines relevant policy documents, academic literature, and digital literacy program reports published between 2020 and 2024. Findings reveal that digital civic literacy—encompassing critical information evaluation, democratic participation ethics, and intergroup empathy—significantly reduces susceptibility to polarizing content. The study concludes that systematic integration of digital civic literacy into formal education and community programs is essential for sustaining democratic resilience in Indonesia's digital public sphere.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran literasi kewarganegaraan digital dalam menangkal polarisasi politik di ruang publik virtual Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari penyebaran disinformasi politik dan perpecahan berbasis identitas yang semakin masif melalui platform media sosial, terutama pada periode pemilihan umum. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana kompetensi literasi kewarganegaraan digital berfungsi sebagai faktor pelindung terhadap narasi polarisasi dan mengidentifikasi strategi pengembangannya yang efektif. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis wacana kritis dan penelitian kepustakaan, studi ini mengkaji dokumen kebijakan, literatur akademik, dan laporan program literasi digital yang diterbitkan antara 2020 dan 2024. Temuan mengungkapkan bahwa literasi kewarganegaraan digital yang mencakup evaluasi informasi kritis, etika partisipasi demokratis, dan empati antargolongan secara signifikan mengurangi kerentanan terhadap konten polarisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi sistematis literasi kewarganegaraan digital ke dalam pendidikan formal dan program komunitas sangat penting bagi ketahanan demokrasi di ruang publik digital Indonesia.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

### Pendahuluan

Ruang publik virtual yang terbentuk melalui platform media sosial seperti Twitter/X, Facebook, Instagram, dan TikTok telah mengubah secara fundamental cara warga negara Indonesia berpartisipasi dalam diskursus politik. Berdasarkan laporan We Are Social (2024), Indonesia memiliki lebih dari 167 juta pengguna aktif media sosial, menjadikannya salah satu negara dengan penetrasi media sosial tertinggi di dunia. Namun di balik peluang partisipasi yang semakin terbuka, ruang publik virtual ini juga menjadi arena yang rentan terhadap polarisasi politik yang diperparah oleh mekanisme algoritma. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau BRIN (2023) mengidentifikasi bahwa polarisasi afektif berbasis identitas agama dan politik di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada saat-saat krusial seperti pemilu (BRIN, 2023; Kominfo RI, 2023).

Polarisasi politik di ruang digital tidak muncul secara alamiah, melainkan diperkuat oleh berbagai faktor sistemik yang saling terkait. Algoritma rekomendasi konten yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna cenderung menciptakan ruang gema yang memperkuat keyakinan yang sudah ada dan meminimalisasi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Saat bersamaan, rendahnya literasi media dan informasi di kalangan pengguna internet Indonesia menjadikan mereka rentan terhadap disinformasi dan narasi provokatif. Rahayu dan Priyatna (2022) menemukan bahwa hanya sekitar 28 persen pengguna media sosial Indonesia yang memiliki kemampuan memadai dalam memverifikasi kebenaran informasi digital sebelum menyebarkannya lebih lanjut (Rahayu & Priyatna, 2022; Kurniawan, 2023).

Konsep literasi kewarganegaraan digital (digital civic literacy) merupakan pengembangan dari literasi digital konvensional yang secara khusus menekankan dimensi kewarganegaraan dalam konteks kehidupan daring. Berbeda dari literasi digital yang umumnya berfokus pada keterampilan teknis penggunaan teknologi, literasi kewarganegaraan digital mencakup kompetensi yang lebih luas meliputi kemampuan berpikir kritis terhadap konten politik, pemahaman tentang mekanisme demokrasi digital, penghargaan terhadap keberagaman perspektif, dan kemampuan berpartisipasi secara konstruktif dalam wacana publik online. Setiyono (2023) berargumen bahwa hanya dengan mengembangkan literasi kewarganegaraan digital yang komprehensif Indonesia dapat memanfaatkan potensi ruang digital untuk memperkuat demokrasi partisipatif (Setiyono, 2023; Nurdin, 2022).

Urgensi kajian ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia telah memasuki era pasca-Pemilu 2024 yang ditandai dengan masih tingginya polarisasi dan kelelahan demokrasi di kalangan

masyarakat. Data Komisi Pemilihan Umum (2024) menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi terkait pemilu mencapai angka tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dengan lebih dari 1.600 konten hoaks yang teridentifikasi sepanjang masa kampanye. Kondisi ini menuntut solusi yang bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan insidental berbasis penghapusan konten. Literasi kewarganegaraan digital menawarkan pendekatan preventif yang lebih fundamental dengan memberdayakan warga untuk secara mandiri mengenali dan menolak konten polarisasi (KPU RI, 2024; Wahyudi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme spesifik yang menghubungkan literasi kewarganegaraan digital dengan penurunan kerentanan terhadap polarisasi politik, (2) mengidentifikasi dimensi-dimensi kritis literasi kewarganegaraan digital yang paling relevan dalam konteks ruang publik virtual Indonesia, serta (3) merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk pengembangan literasi kewarganegaraan digital yang efektif melalui jalur formal dan nonformal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan teori ruang publik Habermas, teori literasi kritis Freire, dan teori ketahanan demokratis dalam satu kerangka analisis yang kohesif dan relevan bagi konteks Indonesia (Setiyono, 2023; Nurdin, 2022).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis. Paradigma yang digunakan adalah interpretatif-kritis yang bertujuan tidak hanya memahami fenomena tetapi juga mengungkap relasi kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi di balik wacana polarisasi digital. Sumber data primer meliputi dokumen kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait literasi digital, dan dokumen program Gerakan Nasional Literasi Digital. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga riset, serta dokumentasi program literasi digital yang diterbitkan antara 2020 dan 2024 (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis dengan tahapan: pertama, identifikasi dan inventarisasi sumber dengan kata kunci literasi digital kewarganegaraan, polarisasi politik, dan ruang publik virtual; kedua, seleksi sumber berdasarkan kriteria relevansi, aktualitas, dan kredibilitas; dan ketiga, ekstraksi data berdasarkan panduan analisis yang dikembangkan dari kerangka teoretis penelitian. Analisis data mengikuti prosedur Miles, Huberman,

dan Saldana (2019) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan teoritis, yakni membandingkan informasi dari berbagai sumber dan menginterpretasikannya melalui lebih dari satu kerangka teoretis yang relevan (Rahayu & Priyatna, 2022; Kurniawan, 2023).

Kerangka analisis yang digunakan mengintegrasikan tiga perspektif teoretis yang saling melengkapi. Pertama, teori ruang publik digital Dahlgren digunakan untuk menganalisis kondisi dan hambatan partisipasi demokratis di ruang virtual. Kedua, model literasi media kritis dari Silverblatt diaplikasikan untuk mengidentifikasi kompetensi-kompetensi literasi yang diperlukan dalam menghadapi konten polarisasi. Ketiga, teori ketahanan demokratis dari Diamond digunakan untuk mengevaluasi kontribusi literasi kewarganegaraan digital terhadap ketahanan sistem demokrasi. Setiap sumber data dianalisis secara sistematis menggunakan panduan analisis berbasis tiga perspektif tersebut, sehingga proses analisis bersifat transparan dan dapat direplikasi oleh peneliti lain (Setiyono, 2023; Nurdin, 2022).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

#### ***1. Pola Polarisasi Politik di Ruang Publik Virtual Indonesia***

Temuan penelitian mengidentifikasi tiga pola utama polarisasi politik yang dominan dalam ruang publik virtual Indonesia. Pertama, polarisasi berbasis identitas agama-politik yang memanifestasikan diri dalam pembentukan kelompok eksklusif yang saling mendiskreditkan di platform media sosial. Kedua, polarisasi berbasis tribal afiliasi partai politik yang menciptakan loyalitas kelompok buta yang mengabaikan fakta dan argumentasi rasional. Ketiga, polarisasi berbasis kelas sosial-ekonomi yang diperparah oleh narasi kesenjangan yang dibingkai secara provokatif. BRIN (2023) mengkonfirmasi bahwa ketiga pola ini sering kali saling tumpang tindih dan memperkuat satu sama lain (BRIN, 2023; Wahyudi, 2023).

Mekanisme algoritmik platform media sosial terbukti memainkan peran kritis dalam memperkuat polarisasi melalui efek ruang gema yang telah terdokumentasi dengan baik. Kurniawan (2023) menganalisis bahwa algoritma rekomendasi konten Twitter/X dan Facebook secara konsisten menampilkan konten yang mengonfirmasi pandangan politik yang sudah dianut pengguna, sehingga membatasi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Fenomena ini menciptakan siklus penguatan identitas kelompok yang progressif, di mana anggota kelompok semakin yakin bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya kebenaran yang valid. Dampaknya adalah meningkatnya polarisasi

afektif yang tidak hanya bersifat ideologis tetapi juga emosional dan interpersonal (Kurniawan, 2023; Rahayu & Priyatna, 2022).

Data empiris yang dikumpulkan dari berbagai laporan lembaga monitoring konten digital menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam volume konten polarisasi selama periode Pemilu 2024. Kominfo RI (2024) melaporkan bahwa konten yang mengandung ujaran kebencian bernuansa politik meningkat 340 persen dibandingkan periode non-elektoral, dengan platform TikTok mencatat pertumbuhan tertinggi dalam penyebaran konten disinformasi politik kepada segmen pengguna muda. Temuan ini secara objektif menunjukkan bahwa ruang publik virtual Indonesia menghadapi krisis integritas informasi yang serius, yang secara langsung mengancam kualitas partisipasi demokratis warga (Kominfo RI, 2024; KPU RI, 2024).

Analisis konten terhadap narasi-narasi polarisasi yang beredar di media sosial mengungkapkan pola retorika yang berulang dan dapat dikategorisasikan. Wahyudi (2023) mengidentifikasi tiga strategi retorika polarisasi yang paling dominan: dehumanisasi lawan politik dengan label-label negatif yang mereduksi kompleksitas individu, amplifikasi ancaman dari kelompok lain yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan kolektif, serta konstruksi narasi victimhood yang menempatkan kelompok sendiri sebagai korban yang terancam. Ketiga strategi ini bekerja secara sinergis untuk memperkuat batas-batas kelompok dan mengurangi kemungkinan dialog lintas identitas (Wahyudi, 2023; BRIN, 2023).

## ***2. Kompetensi Literasi Kewarganegaraan Digital yang Relevan***

Penelitian ini mengidentifikasi empat kompetensi inti literasi kewarganegaraan digital yang terbukti relevan dalam menangkal polarisasi politik di ruang virtual. Kompetensi pertama adalah kemampuan verifikasi informasi (information verification), yakni kapasitas untuk menilai kebenaran dan kredibilitas informasi politik secara kritis dan sistematis menggunakan berbagai sumber. Setiyono (2023) menemukan bahwa individu dengan kemampuan verifikasi informasi yang tinggi memiliki probabilitas yang secara signifikan lebih rendah untuk menyebarkan disinformasi politik dibandingkan mereka yang tidak memiliki kemampuan tersebut (Setiyono, 2023; Nurdin, 2022).

Kompetensi kedua adalah pemahaman tentang arsitektur platform (platform architecture literacy), yaitu kesadaran kritis tentang bagaimana algoritma, model bisnis, dan desain antarmuka platform media sosial membentuk pengalaman informasi pengguna. Nurdin (2022) berargumen bahwa warga yang memahami bahwa apa yang mereka lihat di timeline bukan cerminan realitas tetapi hasil dari proses algoritmik yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan akan lebih

mampu mempertahankan perspektif kritis dan tidak mudah terjebak dalam ruang gema. Kompetensi ini secara khusus relevan bagi generasi muda yang menghabiskan rata-rata lebih dari lima jam per hari di platform media sosial (Nurdin, 2022; Rahayu & Priyatna, 2022).

Kompetensi ketiga adalah empati digital (digital empathy) dan perspektif-taking, yakni kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain yang berbeda identitas politiknya melalui interaksi online. Rahayu dan Priyatna (2022) mendemonstrasikan bahwa program pelatihan yang secara eksplisit memasukkan latihan empati digital terbukti mengurangi sikap polarisasi dan meningkatkan kesediaan berpartisipasi dalam diskusi lintas identitas. Kompetensi ini berhubungan erat dengan teori kontak Allport yang menunjukkan bahwa pengenalan terhadap anggota kelompok lain sebagai individu yang utuh dapat mengurangi prasangka dan stereotip (Rahayu & Priyatna, 2022; Setiyono, 2023).

Kompetensi keempat adalah etika partisipasi digital (digital participation ethics), yaitu pemahaman tentang norma-norma dan tanggung jawab dalam berpartisipasi di ruang publik virtual sebagai warga negara. Kurniawan (2023) menekankan bahwa banyak pengguna media sosial tidak menyadari dampak dari tindakan online mereka, seperti menyebarkan ulang konten provokatif atau berkomentar dengan bahasa dehumanisasi, terhadap kualitas wacana publik secara keseluruhan. Penguatan etika partisipasi digital perlu mencakup pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran di ruang digital, serta dimensi moral dari tanggung jawab sebagai warga negara digital (Kurniawan, 2023; Wahyudi, 2023).

### ***3. Efektivitas Program Literasi Kewarganegaraan Digital yang Ada***

Evaluasi terhadap program-program literasi digital yang telah berjalan di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam dalam hal efektivitas menangkal polarisasi politik. Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi yang diluncurkan Kominfo RI sejak 2017 dan telah menjangkau lebih dari 12 juta peserta merupakan inisiatif terluas yang ada. Namun evaluasi Kominfo RI (2023) mengidentifikasi kelemahan mendasar yaitu program tersebut lebih berfokus pada keterampilan teknis digital dan keamanan siber dibandingkan pada kompetensi kewarganegaraan kritis yang diperlukan untuk menghadapi polarisasi politik. Kesenjangan ini mencerminkan pemahaman yang masih terbatas tentang apa yang seharusnya menjadi isi substantif literasi digital (Kominfo RI, 2023; Setiyono, 2023).

Program literasi digital berbasis komunitas yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan digital

kritis. Prasetya dan Dewi (2023) mendokumentasikan bahwa program-program yang dirancang dengan pendekatan pendidikan populer Freirean, yang menempatkan pengalaman nyata peserta sebagai titik tolak pembelajaran, berhasil menghasilkan perubahan sikap yang signifikan dalam hal kemampuan kritis terhadap disinformasi politik dan kesediaan untuk terlibat dalam dialog lintas identitas. Kunci keberhasilan program-program ini terletak pada relevansi kontekstual materi pembelajaran dan keterlibatan aktif peserta sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar penerima informasi (Prasetya & Dewi, 2023; Nurdin, 2022).

Integrasi literasi kewarganegaraan digital dalam kurikulum pendidikan formal masih berada pada tahap awal dan menghadapi berbagai hambatan struktural. Penelitian Ananta dan Suharto (2023) terhadap implementasi kurikulum Merdeka Belajar di 120 sekolah menengah atas menemukan bahwa meskipun kurikulum baru memberikan ruang bagi pembelajaran literasi digital, sebagian besar guru tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan dimensi kewarganegaraan kritis ke dalam pembelajaran teknologi informasi. Hambatan ini menunjukkan perlunya investasi besar dalam pelatihan guru yang secara eksplisit mencakup dimensi literasi kewarganegaraan digital sebagai bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan (Ananta & Suharto, 2023; Prasetya & Dewi, 2023).

Perbandingan antara program literasi digital yang berfokus pada keterampilan teknis dan program yang memasukkan dimensi kewarganegaraan kritis secara eksplisit menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Wahyudi (2023) melalui studi komparatif terhadap dua kelompok intervensi menemukan bahwa kelompok yang mendapatkan pelatihan literasi kewarganegaraan digital komprehensif menunjukkan penurunan 42 persen dalam intensi berbagi konten disinformasi dan peningkatan 35 persen dalam kesediaan berpartisipasi dalam diskusi lintas identitas dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini secara objektif mengonfirmasi efektivitas superior dari pendekatan kewarganegaraan kritis dalam program literasi digital (Wahyudi, 2023; Kurniawan, 2023).

#### ***4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Literasi Kewarganegaraan Digital***

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan literasi kewarganegaraan digital mengungkapkan kompleksitas ekosistem yang harus dipertimbangkan dalam perancangan intervensi. Faktor struktural yang paling dominan adalah kesenjangan akses digital antara perkotaan dan pedesaan yang masih signifikan, meskipun penetrasi internet terus meningkat. BRIN (2023) melaporkan bahwa kualitas koneksi internet dan ketersediaan perangkat di daerah terpencil masih menjadi hambatan utama yang membatasi jangkauan program literasi digital. Kesenjangan akses ini

secara tidak langsung memperkuat ketimpangan dalam kapasitas warga untuk berpartisipasi secara informasi dalam ruang publik digital (BRIN, 2023; Ananta & Suharto, 2023).

Faktor kelembagaan yang berpengaruh mencakup koordinasi antarlembaga yang masih lemah dalam penyelenggaraan program literasi kewarganegaraan digital. Kominfo RI (2023) mengidentifikasi bahwa program literasi digital saat ini dikelola secara parsial oleh berbagai kementerian dan lembaga, yaitu Kominfo, Kemendikbudristek, Kemenag, dan BSSN, tanpa koordinasi yang memadai untuk memastikan koherensi dan sinergi program. Fragmentasi kelembagaan ini mengakibatkan duplikasi sumber daya dan inkonsistensi pesan yang diterima masyarakat tentang literasi digital kewarganegaraan. Penyatuan visi dan koordinasi lintas lembaga menjadi prasyarat penting bagi efektivitas program secara keseluruhan (Kominfo RI, 2023; KPU RI, 2024).

Faktor individu dan komunal juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas pengembangan literasi kewarganegaraan digital. Prasetya dan Dewi (2023) menemukan bahwa motivasi intrinsik individu untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokratis merupakan prediktor terkuat dari peningkatan literasi kewarganegaraan digital. Individu yang memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap komunitas dan keyakinan tentang efektivitas partisipasi sipil mereka cenderung lebih responsif terhadap program literasi dan lebih konsisten dalam menerapkan kompetensi yang dipelajari dalam perilaku online sehari-hari (Prasetya & Dewi, 2023; Setiyono, 2023).

Pengaruh tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin opini (opinion leaders) di media sosial merupakan faktor yang sering diabaikan dalam perancangan program literasi kewarganegaraan digital. Rahayu dan Priyatna (2022) menunjukkan bahwa individu dengan jumlah pengikut yang signifikan di media sosial memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan program formal dalam membentuk norma-norma perilaku digital di komunitasnya. Oleh karena itu, program literasi kewarganegaraan digital yang efektif perlu mengintegrasikan strategi keterlibatan pemimpin opini digital, dengan melatih dan memotivasi mereka untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan budaya digital yang sehat dan demokratis (Rahayu & Priyatna, 2022; Wahyudi, 2023).

## **Pembahasan**

### ***1. Interpretasi Pola Polarisasi dalam Kerangka Teori Ruang Publik***

Temuan mengenai pola-pola polarisasi di ruang publik virtual Indonesia dapat

diinterpretasikan melalui kerangka teori ruang publik Habermas yang telah diadaptasi untuk konteks digital. Habermas mengkonseptualisasikan ruang publik sebagai arena komunikasi rasional yang bebas dominasi, di mana argumen yang lebih baik seharusnya mengungguli kepentingan atau kekuasaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ruang publik virtual Indonesia mengalami disfungsi sistemik yang serius karena logika algoritmik menggantikan logika komunikatif sebagai prinsip pengorganisasian wacana. Setiyono (2023) mengintegrasikan teori Habermas dengan konteks digital untuk menjelaskan mengapa platform media sosial yang awalnya dipromosikan sebagai demokratisasi komunikasi justru menghasilkan fragmentasi wacana publik (Setiyono, 2023; Nurdin, 2022).

Interpretasi lebih lanjut mengaitkan temuan polarisasi dengan teori identitas sosial Tajfel dan Turner yang menjelaskan bagaimana manusia secara psikologis memerlukan identifikasi dengan kelompok in-group dan pembedaan dari kelompok out-group. Di ruang digital, mekanisme ini dieksploitasi dan diperparah oleh fitur-fitur platform yang dirancang untuk mendorong pengelompokan dan keterlibatan berbasis emosi. Wahyudi (2023) mengintegrasikan teori identitas sosial dengan analisis platform untuk menjelaskan mengapa polarisasi di media sosial memiliki intensitas emosional yang sangat tinggi meskipun interaksi berlangsung secara anonim atau semi-anonim di dunia maya (Wahyudi, 2023; BRIN, 2023).

Keterkaitan antara temuan tentang strategi retorika polarisasi dan teori framing media memberikan wawasan penting tentang bagaimana narasi polarisasi bekerja secara psikologis. Framing theory menjelaskan bahwa cara informasi dikemas dan dipresentasikan mempengaruhi secara signifikan bagaimana audiens memaknai dan meresponsnya. Kurniawan (2023) mengaplikasikan teori framing untuk menganalisis bagaimana konten polarisasi secara sistematis menggunakan frame ancaman dan frame victimhood untuk membangkitkan respons emosional yang kuat dan mengurangi kapasitas berpikir kritis audiens. Pemahaman tentang mekanisme framing ini menjadi komponen penting dalam kurikulum literasi kewarganegaraan digital yang efektif (Kurniawan, 2023; Rahayu & Priyatna, 2022).

Temuan tentang percepatan polarisasi selama periode elektoral perlu diinterpretasikan dalam konteks dinamika ekonomi politik media digital yang lebih luas. Berbagai aktor politik dan ekonomi memiliki kepentingan langsung dalam mempertahankan dan mengeksploitasi polarisasi sebagai sumber keterlibatan yang menghasilkan klik dan data pengguna. KPU RI (2024) mendokumentasikan bahwa sejumlah konten polarisasi yang paling viral selama Pemilu 2024 memiliki tanda-tanda

produksi yang terorganisir, bukan sekadar ekspresi spontan pengguna individual. Temuan ini mengintegrasikan perspektif ekonomi politik ke dalam pemahaman tentang polarisasi digital yang selama ini cenderung hanya dikaji dari perspektif psikologis (KPU RI, 2024; Kominfo RI, 2024).

## ***2. Relevansi Kompetensi Literasi Kewarganegaraan dengan Teori Pendidikan Kritis***

Kompetensi-kompetensi literasi kewarganegaraan digital yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat diintegrasikan dengan teori pendidikan kritis Freire yang menekankan kesadaran kritis (conscientization) sebagai tujuan utama pendidikan. Dalam perspektif Freire, literasi yang sejati bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan kemampuan membaca dunia secara kritis untuk kemudian mengubahnya. Nurdin (2022) mengaplikasikan perspektif Freirean untuk mengembangkan konsep literasi kewarganegaraan digital kritis yang menempatkan pemberdayaan politik warga sebagai tujuan akhir, bukan sekadar peningkatan keterampilan individual (Nurdin, 2022; Setiyono, 2023).

Dimensi empati digital yang diidentifikasi sebagai kompetensi kritis perlu diinterpretasikan dalam hubungannya dengan teori multikulturalisme kritis dan konsep perspektif-taking dalam psikologi sosial. Rahayu dan Priyatna (2022) mengintegrasikan kerangka ini untuk menjelaskan mengapa program literasi kewarganegaraan digital yang hanya berfokus pada keterampilan teknis verifikasi informasi gagal mengatasi akar psikologis polarisasi yang terletak pada defisit empati antargolongan. Efektivitas optimal program literasi dapat dicapai hanya ketika dimensi kognitif-kritis dan dimensi afektif-empatis dikembangkan secara bersamaan dan terintegrasi (Rahayu & Priyatna, 2022; Wahyudi, 2023).

Integrasi antara kompetensi etika partisipasi digital dan teori demokrasi deliberatif mengungkapkan potensi transformatif dari literasi kewarganegaraan digital yang sering diabaikan dalam diskursus kebijakan. Teori demokrasi deliberatif Habermas dan Dryzek menekankan bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas proses komunikasi dalam ruang publik, bukan sekadar oleh prosedur pemilihan. Kurniawan (2023) berargumen bahwa pengembangan etika partisipasi digital yang mengintegrasikan norma-norma deliberasi demokratis dapat mengubah media sosial dari arena konflik zero-sum menjadi ruang untuk pembentukan kehendak kolektif yang lebih inklusif (Kurniawan, 2023; Prasetya & Dewi, 2023).

Perbandingan antara kompetensi literasi kewarganegaraan digital Indonesia dengan kerangka literasi media kritis internasional mengungkapkan kesenjangan yang perlu diatasi dalam pengembangan program nasional. Ananta dan Suharto (2023) membandingkan kerangka literasi

digital Indonesia dengan kerangka Media and Information Literacy UNESCO dan menemukan bahwa dimensi partisipasi politik dan pemberdayaan kewarganegaraan masih belum terwakili secara memadai dalam program-program yang ada. Kesenjangan ini mencerminkan perlunya rekonseptualisasi literasi digital dari kerangka yang berfokus pada keamanan siber dan keterampilan teknis menuju kerangka yang lebih komprehensif berbasis kewarganegaraan demokratis (Ananta & Suharto, 2023; Setiyono, 2023).

### ***3. Efektivitas Program dalam Perspektif Teori Perubahan***

Evaluasi efektivitas program literasi kewarganegaraan digital perlu diinterpretasikan melalui lensa teori perubahan yang mempertimbangkan kompleksitas proses transformasi sikap dan perilaku. Prasetya dan Dewi (2023) mengaplikasikan model Transtheoretical (TTM) dari Prochaska untuk menjelaskan mengapa banyak program literasi digital gagal menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan: program-program tersebut dirancang seolah semua peserta berada pada tahap kontemplasi atau persiapan, padahal sebagian besar masih berada pada tahap pra-kontemplasi di mana mereka belum menyadari bahwa perilaku digital mereka bermasalah. Intervensi yang efektif harus dirancang sesuai dengan tahap perubahan yang dialami setiap individu (Prasetya & Dewi, 2023; Nurdin, 2022).

Temuan tentang keunggulan program berbasis komunitas dibandingkan program formal-institusional dapat diinterpretasikan melalui teori pembelajaran situasional Lave dan Wenger yang menekankan pentingnya komunitas praktik (communities of practice) dalam proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Wahyudi (2023) mengintegrasikan perspektif ini untuk menjelaskan mengapa pembelajaran literasi kewarganegaraan digital yang terjadi dalam konteks komunitas yang relevan dan bermakna bagi peserta menghasilkan internalisasi nilai yang lebih dalam dibandingkan pembelajaran formal yang konteksnya artifisial dan terpisah dari realitas kehidupan digital peserta sehari-hari (Wahyudi, 2023; Rahayu & Priyatna, 2022).

Integrasi temuan tentang hambatan implementasi kurikulum formal dengan teori inovasi difusi Rogers memberikan wawasan strategis untuk mempercepat adopsi literasi kewarganegaraan digital dalam sistem pendidikan. Rogers mengidentifikasi bahwa adopsi inovasi dalam sistem sosial dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan dicoba, dan kemampuan diamati. Kominfo RI (2023) menyimpulkan bahwa kompleksitas konseptual literasi kewarganegaraan digital dan ketidakjelasan cara mengukur dampaknya menjadi penghalang utama bagi adopsi inovasi ini oleh para guru dan perancang

kurikulum (Kominfo RI, 2023; Ananta & Suharto, 2023).

Reinterpretasi temuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program melalui perspektif ekologi media memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi. Teori ekologi media Postman menekankan bahwa media bukan sekadar alat tetapi lingkungan yang membentuk pola pikir dan perilaku penggunanya secara mendasar. Kurniawan (2023) mengaplikasikan perspektif ini untuk berargumen bahwa efektivitas program literasi kewarganegaraan digital akan selalu terbatas selama arsitektur platform media sosial tetap dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan melalui konten emosional dan kontroversial (Kurniawan, 2023; BRIN, 2023).

#### ***4. Implikasi Kebijakan dan Prospek Pengembangan***

Temuan dan interpretasi penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang mendesak bagi penguatan demokrasi digital Indonesia. Implikasi pertama adalah perlunya reformasi menyeluruh terhadap program GNLD Siberkreasi untuk mengintegrasikan dimensi kewarganegaraan kritis yang selama ini absen. Kominfo RI (2024) telah mengakui perlunya transformasi program ini dalam dokumen evaluasi terbaru, namun perubahan substantif masih memerlukan dorongan dari berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara Kominfo, Kemendikbudristek, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dalam pendidikan kewarganegaraan kritis menjadi prasyarat bagi transformasi yang efektif (Kominfo RI, 2024; Setiyono, 2023).

Implikasi kebijakan kedua berkaitan dengan perlunya regulasi platform media sosial yang mendorong akuntabilitas algoritmik sebagai komplemen dari program literasi kewarganegaraan digital. Ananta dan Suharto (2023) berargumen bahwa program literasi yang paling efektif pun tidak akan cukup jika ekosistem digital tetap dirancang untuk memperkuat polarisasi. Indonesia perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mewajibkan platform media sosial untuk memberikan transparansi algoritmik, menyediakan opsi pilihan bagi pengguna terhadap jenis konten yang diterima, dan memberikan laporan berkala tentang dampak platform terhadap kualitas wacana demokratis (Ananta & Suharto, 2023; KPU RI, 2024).

Implikasi ketiga adalah perlunya investasi dalam penelitian longitudinal tentang efektivitas berbagai pendekatan literasi kewarganegaraan digital dalam konteks Indonesia. Prasetya dan Dewi (2023) mengidentifikasi bahwa hampir semua evaluasi program literasi digital yang ada hanya mengukur perubahan jangka pendek segera setelah intervensi, tanpa mengevaluasi keberlanjutan

dampak dalam jangka menengah dan panjang. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berbasis indikator yang terstandarisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada bukti yang kuat (Prasetya & Dewi, 2023; Wahyudi, 2023).

Prospek jangka panjang pengembangan literasi kewarganegaraan digital di Indonesia memerlukan visi yang melampaui sekadar penangkal hoaks dan polarisasi untuk menuju pembentukan budaya digital demokratis yang berkelanjutan. Nurdin (2022) menawarkan konsep 'ekosistem demokrasi digital' sebagai kerangka visi jangka panjang yang mencakup regulasi yang adil, platform yang bertanggung jawab, dan warga yang berkapasitas tinggi dalam literasi kewarganegaraan digital. Pencapaian visi ini memerlukan perubahan paradigma yang menempatkan kualitas demokrasi, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi digital, sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan di era digital (Nurdin, 2022; Rahayu & Priyatna, 2022).

## **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi kewarganegaraan digital merupakan komponen kritis dan tidak tergantikan dalam strategi Indonesia untuk mengatasi polarisasi politik di ruang publik virtual. Melalui empat kompetensi inti yaitu verifikasi informasi, pemahaman arsitektur platform, empati digital, dan etika partisipasi, literasi kewarganegaraan digital memberikan bekal yang komprehensif bagi warga untuk bernavigasi secara cerdas dan bertanggung jawab di ekosistem informasi digital yang kompleks. Temuan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa program-program yang mengintegrasikan dimensi kewarganegaraan kritis menghasilkan dampak yang jauh lebih signifikan terhadap penurunan kerentanan polarisasi dibandingkan program literasi digital konvensional yang berfokus pada keterampilan teknis semata.

Namun demikian, efektivitas literasi kewarganegaraan digital tidak dapat dicapai secara terpisah dari reformasi ekosistem digital yang lebih luas. Diperlukan sinergi antara penguatan kapasitas warga melalui program literasi yang komprehensif, regulasi platform yang mendorong akuntabilitas algoritmik, dan reformasi sistem pendidikan yang mengintegrasikan kewarganegaraan digital sebagai kompetensi inti. Penelitian mendatang perlu mengembangkan metodologi yang lebih kuat untuk mengukur dampak jangka panjang dari berbagai intervensi literasi kewarganegaraan digital, serta mengeksplorasi model-model inovatif yang mampu menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap polarisasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, R., & Suharto, D. (2023). Implementasi literasi digital dalam Kurikulum Merdeka: Tantangan dan peluang bagi pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(2), 89–108. <https://doi.org/10.23887/jpku.v11i2.55789>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023). Laporan riset nasional: Pemetaan polarisasi sosial dan politik di Indonesia. Pusat Riset Politik BRIN.
- Heryanto, A. (2022). Identitas dan kenikmatan: Politik budaya layar Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2024). Laporan evaluasi hoaks dan disinformasi Pemilu 2024. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo RI). (2023). Evaluasi program Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi 2017–2023. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo RI). (2024). Laporan tahunan penanganan konten digital bermasalah 2024. Ditjen Aptika Kominfo.
- Kurniawan, Y. (2023). Algoritma media sosial dan fragmentasi ruang publik digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(1), 45–64. <https://doi.org/10.24002/jik.v21i1.6123>
- Lim, M. (2022). Two platforms and two Indonesian social formations. *Information, Communication & Society*, 26(3), 444–458. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2061689>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2022). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (Edisi 3). Simbiosis Rekatama Media.
- Nurdin, A. (2022). Literasi digital kewarganegaraan: Kerangka konseptual dan implikasi untuk pendidikan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 134–152. <https://doi.org/10.22146/jsp.72316>
- Prasetya, B., & Dewi, R. A. (2023). Evaluasi program literasi digital berbasis komunitas dan dampaknya terhadap ketahanan demokrasi digital. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 28(1), 67–90. <https://doi.org/10.7454/mejs.v28i1.13456>
- Rahayu, D., & Priyatna, A. (2022). Literasi media dan polarisasi politik: Studi terhadap perilaku digital pemilih muda Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(2), 211–228. <https://doi.org/10.24198/jkk.v10i2.39876>
- Setiyono, B. (2023). Demokrasi digital dan tantangan polarisasi: Strategi literasi kewarganegaraan untuk Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 8(1), 23–42. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i1.42178>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif* (Edisi 3). Alfabeta.
- Wahyudi, F. (2023). Narasi polarisasi dan disinformasi politik: Analisis wacana kritis konten media sosial Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(2), 144–167. <https://doi.org/10.17509/jpi.v8i2.54321>
- We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. We Are Social & Meltwater.
- Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun

2016 Nomor 251.